



Tiga Kawasan Kumuh Segera Ditangani

JOGJA -- Sebanyak tiga kawasan yang masuk dalam kriteria kumuh akan segera ditangani Pemkot Jogja bersama pemangku kepentingan dengan fokus utama di wilayah Kelurahan Kricak, Kelurahan Tegal Panggung dan Kelurahan Sorosutan.

"Penanganannya dengan program Merti Kampung, yaitu tidak hanya melakukan perbaikan fisik rumah tetapi juga infrastruktur di kawasan tersebut, misalnya sarana jalan," kata Ketua Pusat Kajian Perumahan dan Permukiman Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr Ir Budi

Prayitno, dalam seminar perumahan dan permukiman, Rabu.

Menurut Budi, program Merti Kampung menuntut peran serta masyarakat dalam penanganan kawasan kumuh di lingkungan tempat tinggalnya.

Dengan peran serta masyarakat tersebut, menurut dia, program penanganan yang dijalankan dapat lebih tepat sasaran dan menyelesaikan permasalahan yang ada.

"Kebijakan secara nasional sudah ada tetapi program tersebut harus disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah yang me-

miliki keunikan sendiri," katanya.

Ia mengatakan, Pada 2009, di Kelurahan Kricak juga akan didirikan sebuah rumah susun dengan dana pembangunan dari UN Habitat sebesar Rp 10 miliar untuk penanganan kawasan kumuh.

Berdasarkan rencana, rumah susun tersebut akan terdiri dari dua blok yang masing-masing blok terdiri dari empat lantai. Tiga lantai atas digunakan sebagai hunian sedang lantai dasar dipakai sebagai tempat komersial.

"Lahannya sudah ada, yaitu sudah disediakan oleh pemerintah kota

dengan luas sekitar 4.000 meter persegi," ujarnya.

Pembangunan rumah susun, menurut Budi, juga merupakan salah satu cara penanganan kawasan kumuh karena rumah susun dapat membantu efisiensi kawasan.

Secara umum, kawasan yang berpotensi menjadi daerah kumuh adalah tepi sungai, tengah kota, daerah di sepanjang rel kereta api dan dekat pasar.

Dari 45 kelurahan di kota Jogja sebanyak 14 persen dari jumlah itu berada di sepanjang sungai Code, Winongo dan Gadjah Wong. 12

persen berada di daerah sub urban, 32 persen berada di tengah kota, sembilan persen berada di sepanjang rel kereta api dan tiga persen berada di dekat pasar, katanya.

Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, Eko Suryo Maharsono menyatakan, untuk mengatasi kesenjangan antara permukiman di kampung dan pinggir jalan raya adalah dengan pemerataan fasilitas publik.

"Tetapi juga perlu dicari akar permasalahannya sehingga kesenjangan yang ada tidak lagi terlalu jauh," katanya. (ant)

Kepada Yth. :

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Permukiman dan Prasarana	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Badan Perencanaan Pembangunan			

Yogyakarta, 27 September 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005